



SRI SULTAN HAMENGKU BAWONO 10

MEWUJUDKAN CITA-CITA PARA PENDIRI REPUBLIK, Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik

BANGSA yang memiliki Strategi Kebudayaan, berarti memiliki *lightstar* dalam gerak menuju peradaban maju, yang dalam konteks Konvensi Nasional ini adalah *Indonesia Berkemajuan*, sehingga mampu meneguhkan kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan unggul, dan kemampuan untuk mandiri di bidang ekonomi dan politik, sekaligus memperkuat kesatuan nasionalnya.

Meski tidak tertuang dalam GBHN, pada pemerintahan JOKOWI-JK ini bintang pemandu itu adalah *TriSakti Jiwa Proklamasi*, yang dijabarkan dalam *NawaCita*, sembilan jalan perubahan sebagai agenda prioritas *Mewujudkan Cita-Cita Para Pendiri Republik* ini. Membahasnya dalam perspektif *Sosial, Ekonomi dan Politik*, tentu tidak terlepas dari determinan *Budaya* sebagai basis perubahan yang digagas melalui *Revolusi Mental*.

Cita-Cita Pendiri Republik

Sesungguhnya Cita-Cita Pendiri Republik sudah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan, (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. **Melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah NKRI**, konsekuensinya harus mengeliminir ancaman disintegrasi bangsa dan membendung penetrasi *proxy war*, serta okupasi wilayah.
 - Kini kondisi bangsa dalam cengkeraman konsorsium global dengan paham neo-liberal melalui *invisible hands* dari aktor-aktor TNCs (*Trans-National Corporations*), dengan menciptakan fundamentalisme pasar yang bercirikan *free-fight*, doktrin pemujaan primitif terhadap pasar, sehingga mereduksi peran negara (*the end of the nation state*).



TNCs bukan lagi mengokupasi wilayah, tetapi dengan *soft-power* *remote* melalui jejaring ekonomi global, sketsa politik internasional, gurita informasi, dan destruksi moral generasi muda. Jika dulu Pemuda Angkatan 45 berjuang melawan kolonialisme yang *kasatmata*, tetapi kini menghadapi *cola-colonialism* yang *soft*, seakan tak merasakan jika kita sudah “terjajah” kembali.

- TNCs sebagai entitas di luar negara adalah juga dalang *proxy war* yang tidak perlu melibatkan kekuatan militer negara, tetapi lewat politik, program bantuan, budaya, dan *cyber-networks* yang tak kalah berbahayanya meski tanpa letusan senjata. Operasi *proxy war* menggunakan pelemahan dan penghancuran terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara secara masif dan terus-menerus, tanpa kita sadari. Maraknya peredaran narkoba, tawuran antarpelajar dan mahasiswa, aksi anarkisme, kekerasan berwajah agama, adu domba antarkomponen bangsa, etno-nasionalisme sempit, gerakan separatis, pembentukan opini dan rekayasa melalui media sosial adalah bagian dari *proxy war* untuk memecah bangsa agar mengarah ke disintegrasi bangsa. Dengan melemahnya kohesi bangsa, maka TNCs akan dengan mudah menguasai sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
- *Proxy war* juga didukung fakta bahwa saat ini dunia mengalami ancaman *over population*, melebihi daya dukung bumi dari 3-4 miliar manusia menjadi lebih dari 7 miliar. Paradoks ini seiring menipisnya cadangan minyak ditambah perebutan bahan pangan yang mengakibatkan perubahan geopolitik dan akan menggeser konflik dunia ke kawasan *equator* yang kaya sumber pangan, di mana Indonesia berada¹. Bahkan Presiden Soekarno pernah berkata, bahwa kekayaan alam Indonesia suatu saat dapat membuat iri negara-negara di dunia.
- Negara harus hadir melindungi segenap bangsa dengan berbagai payung hukum yang selain pro-rakyat, juga memiliki legitimasi internasional. *Proxy war* yang asimetri ini hanya bisa diatasi dengan meningkatkan ketahanan budaya melalui pendidikan agama dan karakter di TriSentra Pendidikan, di rumah, sekolah, dan di masyarakat untuk mencetak Generasi Emas 2045 yang cerdas-nalar, tangguh-budaya, tahan-kerja, dan kuat-iman. Untuk menjaga keutuhan wilayah, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dalam kerangka NKRI sebagai peletak dasar-dasar desentralisasi asimetris di kawasan perbatasan.

¹ Koran Sindo, Panglima TNI, *Proxy War*, dan *Khatulistiwa*, 20 Agustus 2015.



2. **Cita-cita Pendiri bangsa yang kedua adalah memajukan kesejahteraan bersama.** Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Sila Kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit pasal 27 dan 34 UUD 1945 (Amandemen-4) mengamanatkan tanggungjawab Pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

- Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktekkan secara konsekuen. Pembangunan kesejahteraan sosial belum terintegrasi dalam strategi pembangunan ekonomi. Dengan menguatnya ide liberalisme dan kapitalisme, investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih diminati. Dalam hal ini, kita harus belajar dari negara-negara maju ketika mereka memanusiawikan kapitalisme. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ditanggulangi dengan berbagai skim jaminan sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kelas bawah.
- Gambaran makro dan mikro di atas menunjukkan banyaknya penduduk Indonesia yang serba kekurangan. Baik dari amanat konstitusi maupun contoh dari negara-negara kapitalis-liberal, Pemerintah mengemban kewajiban terbesar untuk mengalokasikan dana ke sektor sosial. Dengan komitmen dan pengaturan yang baik, Pemerintah sesungguhnya mampu meningkatkan anggaran untuk pembangunan sosial. Persoalannya serng terletak pada mis-alokasi dan mis-manajemen penganggarnya².

3. **Tujuan Indonesia menurut UUD 1945 yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.** Refleksi kritis atas butir ketiga Pembukaan UUD 1945 itu, hendaklah diletakkan pada kesadaran para Pendiri Republik akan arti pentingnya transformasi budaya tradisional-kolonial ke budaya modern-demokratis melalui pendidikan. Dalam bahasa Bung Karno harus lewat Revolusi Pancamuka, satu “*telescoped revolution*”, berupa perubahan total melalui *retooling*, reformasi *ala* Bung Karno, dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan dan teknologi, serta budaya³.

- Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 (Amandemen-4) mengamanatkan, “*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’, yang diatur dengan Undang-Undang*”. Jabarannya dituangkan dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, bahwa: “*Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan*

² Gubernur DIY, *Konsep Kesejahteraan Minimum Berbasiskan Pengalaman DIY*, Seminar Nasional Kesejahteraan Sosial Minimum, Kampus UGM, 17 Desember 2009.

³ Presiden Soekarno, *Sidang Pleno Pertama Dewan Perantjang Nasional*, 28 Agustus 1959.



kemampuan dan membentuk watak serta Peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka ‘Mencerdaskan Kehidupan Bangsa’...”.

- Bertolak dari amanat Konstitusi dan Undang-Undang itu, maka kemajuan pendidikan membutuhkan visi dasar bagaimana agar manusia Indonesia “*cerdas dan memiliki keunggulan dalam segala bidang*” melengkapi karakteristik Generasi Emas. Untuk pencapaiannya dijabarkan dalam Renstra Depdiknas RI: cerdas-spiritual (*olah-hati*), cerdas-emosional dan sosial (*olah-rasa*), cerdas-intelektual (*olah-nalar*), cerdas-kinestetis (*olah-raga*), dan kompetitif berkepribadian unggul⁴.
- Dalam lima butir Renstra itu, terkandung totalitas potensi subyek didik yang harus dikembangkan terintegrasi untuk mewujudkan misi “*Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*” yang menjadi tujuan akhir pendidikan berlandaskan UUD 1945. Misi ini hanya bisa tercapai jika ada keselarasan praktik di lima level: Presiden sebagai penginspirasi dan pengarah, Menteri pengambil kebijakan, Kepala Daerah petunjuk kebijakan, Dinas Pendidikan penyelaras, dan Guru pelaku-penerjemah.

4. **Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.** Di era sekarang ini, tidak ada satu negara pun yang setuju dengan penjajahan. Masing-masing negara ingin menjadi negara yang merdeka. Dalam hal ini, PBB adalah organisasi dunia untuk melaksanakan trilogi: ketertiban dan perdamaian dunia, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Itulah sebabnya Indonesia berupaya mencapai tujuan tersebut bergabung dalam PBB demi membangun ketenteraman bersama.

Dapat disimpulkan, Indonesia sedang mencapai tujuan tersebut secara bertahap. Banyak upaya yang telah membuahkan hasil yang dirasakan masyarakat. Namun, upaya tersebut belumlah cukup. Masih lebih banyak lagi yang harus dilakukan Pemerintah agar tercapainya empat tujuan nasional itu⁵.

Mewujudkan Cita-Cita Pendiri Republik

Lalu, pertanyaannya: Bagaimana “*Mewujudkan Cita-Cita para Pendiri Republik itu dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik?*” Sejatinya jawabannya sudah implisit di dalam *TriSakti* dan *NawaCita*. Tinggal bagaimana—meminjam istilah Presiden Jokowi—mengeksesekusnya. *Meneguhkan Kembali Jalan Ideologis*, menjadikan Pancasila sumber hukum dan perilaku masyarakat.

⁴ Benny Susetyo Pr, *Absurditas Visi Pendidikan Nasional*, 31 Januari 2007.

⁵ Toha Yahya, *Pancasila Menjiwai Tujuan dan Cita-Cita Bangsa*, Artikel, Pusaka Indonesia, 6 Juli 2015.



Terbukti, bangsa Indonesia mampu bertahan dalam deraan gelombang sejarah, karena dipandu oleh Ideologi Pancasila. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; ideologi sebagai bintang pengarah; dan ideologi sebagai praktik kehidupan masyarakat.

1. Membedakan dan Menggerakkan Nilai-Nilai Praksis Pancasila

Di tengah arus deras nya globalisasi, determinasi asing membuat terkikisnya pemaknaan dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa⁶.

- Oleh sebab itu, para pemimpin bangsa wajib menjadi pelopor untuk *'menghidupi dan membedakan'* Pancasila, untuk kemudian *'menginternalisasi'* dan *'menggerakkan'*-nya, sehingga menjadi sumber kebijakan dan perilaku masyarakat. Pancasila harus meresap pada setiap substansi kebijakan dan peraturan, mulai dari tingkat tertinggi sampai pada tingkat terendah. Dari Undang-Undang hingga Peraturan Desa.
- Tetapi kini, telah terjadi kerawanan sosial yang muncul di mana-mana, yang menandai semangat kebersamaan, penghormatan pada keberagaman, dan kohesi sosial kian merenggang, sehingga berpotensi rentan konflik horizontal. Hal ini dampak dari proses pembuatan kebijakan publik yang cenderung parsial, dan kehilangan ruh Pancasila.
- Pancasila memiliki nilai normatif, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai normatif merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang tidak perlu diperdebatkan lagi kebenarannya. Pada dimensi ideal ini, Pancasila menjadi landasan filosofis yang menjadi tempat berpijak, dan sekaligus mengarahkan bangsa Indonesia pada cita-cita kemerdekaannya untuk menyejahterakan rakyat.
- Nilai dasar ini tidak dapat bermakna, jika belum memiliki formulasi dan parameter yang jelas dan konkrit dalam nilai-nilai instrumental yang menjadi arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar.
- Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Pada dimensi aktual ini, Pancasila bukanlah sekadar gagasan, tetapi harus mampu menjawab persoalan bangsa. Bagi setiap warganegara, nilai praksis seharusnya menjadi norma moral perilaku masyarakat sehari-hari.

⁶ Gubernur DIY, *Strategi Kebudayaan: Kepemimpinan, Pendidikan dan Ekonomi, Keynote Speech*, Urun Rembug Nasional, *Jogja Creative Society*, Yogyakarta, 19 Maret 2016.



2. Titik Awal: Sila Keadilan Sosial

Jikalau kebijakan Presiden adalah “*membangun dari pinggiran*” untuk memperkuat ketahanan nasional, sebagai suplemen perlu dilengkapi dengan pembangunan ideologi dari “*anak tangga terbawah Pancasila*”. Secara visual, ibarat anak tangga, Sila Kelima terletak paling bawah yang ditapaki pertama sebelum melangkah ke atas.

- Secara sosiologis Keadilan Sosial, terutama dalam bidang ekonomi, menjadi tuntutan fundamental. Kesenjangan sosial akan memberi komplikasi rumit dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. Jika prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi terjamin, jalan menuju Sila-Sila berikutnya akan menjadi lebih terarah.
- Tidak terbayangkan kehidupan demokrasi pada Sila Keempat, jika kesenjangan ekonomi kian melebar. Kualitas demokrasi akan rendah, jika tidak diperkuat kesejahteraan ekonomi, apalagi dalam situasi ketidakadilan yang diwarnai “demokrasi uang”. Tidak terbayangkan Sila Keempat, Permusyawaratan Rakyat, jika dijalankan dalam perut lapar. Basis yang kuat dalam bidang ekonomi akan memperkukuh penghayatan terhadap Sila Ketiga, Kedua, dan Pertama.
- Jika pijakan sosial ekonomi dan demokrasi kuat, kegairahan hidup persatuan dalam Sila Ketiga akan menjadi lebih kukuh. Keadilan sosial dan kehidupan yang demokratis akan memperkuat persatuan bangsa. Tidak mungkin kemanusiaan akan dihormati, jika tidak adanya keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan.
- Jika Sila Kelima, Keempat, dan Ketiga dilaksanakan dengan baik, tangga Sila Kedua akan terlaksana dengan sendirinya. Kemanusiaan akan tercipta dalam keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan.
- Jika empat Sila itu dilaksanakan, penghayatan Sila KeTuhanan akan semakin kokoh. Rasa keTuhanan akan rendah, jika orang terus bergulat dalam kemiskinan dan kekufuran, intoleransi, tidak demokratis, tidak menghargai persatuan dan kemanusiaan.

Luar biasa ide para Pendiri Bangsa yang telah merumuskan Pancasila yang menjiwai Pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan arah dan orientasi perjuangan bangsa. Karenanya, terlebih penting bagaimana keinginan itu tidak berhenti pada wacana atau retorika, tetapi benar-benar ada dukungan *political will* dari para elite kepemimpinan bangsa dengan cara membumikan dalam program aksi yang dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh rakyat⁷.

⁷ Adaptasi Wisnu Widiatoro, *Mulai dari Sila Keadilan*, Kompas, 7 November 2008.



Rapuhnya Kemandirian Bangsa

Kemandirian adalah sikap yang mengutamakan kemampuan diri dalam mengatasi masalah demi mencapai tujuan nasional, tanpa menutup diri terhadap kerjasama yang saling menguntungkan (*mutual-benefits*). Dalam konsep ini program-program pembangunan dirancang sistematis, agar individu maupun masyarakat menjadi subyek pembangunan. Walaupun kemandirian sebagai filosofi pembangunan juga dianut oleh negara-negara maju, tetapi konsep ini lebih banyak dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang⁸.

Perjuangan untuk mencapai cita-cita memerlukan modal. Kemandirian bangsa sebagai suatu karakter dan sekaligus cita-cita tidak gampang dilakukan. Tidak tergantung dan menggantungkan diri pada bangsa lain, tetapi memerlukan pengorbanan --*jêr basuki mâwâ béâ*. *Kamulyan* itu tidak bisa diraih secara instan, namun membutuhkan *laku prihatin*. Orang yang *prihatin* itu biasanya menderita terlebih dahulu dan mendapatkan kebahagiaan kemudian.

Dalam konsep perkembangan manusia, kemandirian ditandai oleh kemampuan remaja untuk mengurangi, dan bahkan terlepas dari ketergantungan kepada orangtuanya. Bila contoh ini ditarik pada konteks kebangsaan, ketergantungan pada negara lain secara bertahap harus ditinggalkan. Untuk meninggalkan inilah yang membutuhkan modal. Bila pada remaja, modal untuk mandiri itu adalah kemampuan fisik dan psikologis serta kompetensinya, dalam konteks bangsa modalnya adalah modal psiko-sosial.

Modal psiko-sosial ini merupakan gabungan dari dua konsep, yaitu modal psikologis dan modal sosial. Kedua modal ini perlu digabungkan, mengingat dalam membentuk kemandirian bangsa diperlukan tidak saja modal yang tumbuh dari sifat-sifat personal, melainkan juga dibutuhkan modal kolektif sebagai sebuah entitas bangsa, untuk siap berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain.

Kemandirian bangsa dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama berhubungan dengan karakter individu yang merupakan unsur inti dari bangsa. Kedua berhubungan dengan konsep bangsa sebagai kolektivitas individu yang dengan segala sumberdaya yang dimilikinya mampu memenuhi kebutuhan hidup bangsanya, dan tidak terikat oleh bangsa lain. Secara individual ciri-cirinya adalah: (1) menemukan diri sendiri (*self-discovery*), (2) memiliki kemampuan diri (*self-competency*), (3) memiliki kepercayaan diri (*self confidence*), (4) memiliki kemauan yang kuat (*will-power*) untuk mengerjakan sesuatu hingga tercapainya tujuan.

⁸ Bambang Ismawan, *Kemandirian, Suatu Refleksi*, Jurnal Ekonomi Kerakyatan, Artikel, Th. II-No. 3, Mei 2003.



Sedangkan sebagai suatu kolektivitas individu, bangsa yang mandiri memiliki karakteristik, seperti berikut:

1. Mampu menemukan identitas kebangsaannya (*national identity*) yang mencerminkan kekhasan bangsa itu dari bangsa lain. Identitas ini juga mencerminkan dasar-dasar pemersatu bagi bangsa tersebut.
2. Mampu memenuhi standar kebutuhan hidupnya, dan tidak harus selalu memerlukan bangsa lain dalam kehidupan berbangsa (*national self-help*),
3. Pemimpinnya berani membuat keputusan untuk mandiri (*risk taking in decision making*). Negara besar tidak selalu harus memiliki pemimpin yang besar, namun untuk negara berkembang, pemimpin besar dibutuhkan.

Kenyataannya adalah, bahwa individu rakyat dan bangsa Indonesia belum memiliki ciri-ciri yang memberi karakter kemandirian bangsa seperti itu. Tetapi sebaliknya justru menunjukkan rapuhnya kemandirian bangsa.

Jebakan Globalisasi

Sementara globalisasi, telah menciptakan ketimpangan kaya-miskin, baik antarnegara maupun antarsesama penduduk. Dalam hal ini, menarik untuk mengingat inti pidato Ulysses Grant, Presiden AS (1869-1877) yang pada waktu itu AS masih termasuk negara berkembang:

“Selama berabad-abad, Inggris menyandarkan diri pada proteksi secara ekstrem, sehingga menuai hasil besar. Dengan proteksi itulah Inggris membangun kekuatannya. Setelah dua abad, Inggris memandang jauh lebih untung mengadopsi perdagangan bebas, karena proteksi tak lagi menjanjikan keuntungan apa pun. Saya yakin, bahwa dalam 200 tahun ke depan, ketika kita telah mendapatkan semua keuntungan yang diperoleh dari sistem proteksi, Amerika juga akan mengadopsi perdagangan bebas”.

Tidak sampai 200 tahun, tetapi hanya separohnya 100 tahun kemudian, agenda itu terbukti secara sistematis telah dilancarkan AS. Friedrich List, ekonom-politik Jerman, yang dikenal sebagai bapak ‘industri proteksi’ (*infant industry*) menuangkan diagnosa tentang apa yang telah dibuat AS dan Inggris:

“Adalah siasat yang umum dipakai, ketika seorang telah mencapai puncak kejayaan, ditendangnya tangga yang ia pakai untuk memanjat. Ia lenyapkan tangga itu agar pihak lain tidak bisa mengujarnya”.

Kedua bangsa yang mulai dengan proteksi telah menghasilkan industri amat digdaya, sampai tak ada bangsa lain yang bisa bersaing lewat kompetisi bebas.



Mereka selalu melakukan siasat culas dengan melenyapkan tangga yang dipakainya mencapai kebesaran. Lalu ia berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain tentang keuntungan perdagangan bebas, sambil berlagak menyesal bahwa selama menerapkan proteksi, ia telah menempuh jalan salah. Dan sekarang, setelah menempuh perdagangan bebas, ia menemukan kebenaran.

Dewasa ini, negara-negara berkembang dan miskin berulang kali terjebak jeratan utang (*debt-trap*). Belum lagi rezim hak properti intelektual, yang malah menghabisi akses masyarakat miskin untuk mendapat obat-obatan dengan harga terjangkau. Sementara negara-negara kaya memiliki kemampuan untuk menahan risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, negara-negara berkembang dan miskin harus menanggung beban fluktuasi tadi.

Kondisi yang mengekang seperti ini, bahwa kita sudah masuk ke dalam aneka jebakan globalisasi (*globalization-trap*), akan menambah kendala ke arah kemandirian bangsa. Era Pasar Tunggal ASEAN yang sudah berlangsung sekarang ini dapat menjadi batu ujian, apakah kita mampu memenangkan daya saing di arena regional ini.

Catatan Akhir

Budaya adalah strategi bertahan hidup untuk menang (*surviving and winning*)⁹, dan itulah takaran menilai tinggi-rendahnya peradaban suatu bangsa. Peradaban tinggi bukan hanya berwujud kesenian yang rumit, atau nilai-nilai *adiluhung* saja, melainkan dibuktikan dari *how survival is the nation*. Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap upaya membangun dan membentuk daya saing bangsa, agar memiliki reputasi dunia. Dalam negara modern dan maju, yang diminta adalah etos kerja disiplin, kerasionalan, efisiensi dan obyektivitas, selain keuletan bekerja dan belajar, jika kita hendak berperan dalam kemajuan dunia.

Itulah mula kisah kemajuan negara-negara Eropa Utara, Amerika Serikat, dan Asia Timur. Basis keunggulan sosial, ekonomi dan politik tak bisa lain ialah manusia-manusia unggul juga, baik spiritualitas, intelektualitas, dan etos kerjanya. Apa rahasianya? Samuel Huntington dalam *Culture Matters*¹⁰ memberi jawaban tegas: budaya! Budaya yang bertumbuh ialah kerja keras, disiplin, berhemat, menabung, dan mengutamakan pendidikan.

Di situlah akar-akar tunggang pohon keunggulan yang kita cari-cari itu: *spirit of excellence*. Memang *spirit* itu perlu diberi darah, saraf, otot, dan daging, agar menjadi tubuh, artinya menjadikannya sebuah budaya.

⁹ CA van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Alih Bahasa Dick Hartaka, Kanisius, Yogyakarta, 1976.

¹⁰ Jansen H. Sinamo, *Indonesia Unggul, Mungkinkah?*, Opini, Kompas, 3 Desember 2005.



Sekaranglah saatnya untuk bangkit bersama dalam Gerakan Kebudayaan guna memberikan makna nyata peradaban yang maju dan bermartabat bagi *Indonesia yang Berkemajuan*. Visi kepemimpinan bangsa seharusnya bersumber pada visi negara-bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Tugasnya adalah melakukan re-interpretasi visi bangsa yang baku itu secara kontekstual untuk **“Mewujudkan Cita-Cita Para Pendiri Republik, Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik”**.

Rangkaian Program Aksi yang terstruktur, terarah, dan terinci yang dijabarkan dari *TriSakti* dan *NawaCita* yang didukung oleh *Revolusi Mental*, secara konseptual sudah lebih dari cukup sebagai modal awal untuk menjawabnya...

Yogyakarta, 23 Mei 2016

KARATON NGAYOGYAKARTA HADININGRAT,

HAMENGKU BUWONO X